

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan kompleks di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Presentase penduduk miskin di Indonesia sendiri mencapai 9,06 persen pada Maret 2024 (BPS, 2024). Persoalan mendasar bagi suatu negara dengan kemiskinan adalah terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dan dialami oleh berbagai negara di dunia (Ferezagia, 2018).

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kurangnya pendapatan atau tingkat perekonomian yang buruk serta rendahnya aset yang dimiliki (*lack of income and assets*) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Selain itu, kemiskinan juga berhubungan dengan berbagai keterbatasan terhadap akses terutama akses kepada lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Orang-orang miskin (*the poor*) inilah yang menjadi pendorong munculnya keluarga miskin.

Penanganan kemiskinan di Indonesia sendiri telah dilakukan oleh berbagai sektor dan program, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, lembaga sosial masyarakat, maupun perusahaan swasta. Pendekatan penanganan kemiskinan dilakukan melalui dua strategi utama, yakni pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi, contohnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok

miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya, misalnya pemberdayaan melalui program Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun program pemberdayaan-pemberdayaan melalui kelembagaan-kelembagaan lokal (Karang Taruna, PKK, Koperasi, dan lain-lain).

Pengorganisasian masyarakat atau *Community Organizing* menjadi salah satu pendekatan untuk membangun sebuah masyarakat melalui penghimpunan sumber. Menurut Beckwith & Lopez dalam Ismail (2022), pengorganisasian masyarakat didefinisikan sebagai “proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemu-kenali ancaman secara bersama-sama, menemu-kenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi atau perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kepastian untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada”.

Dalam pekerjaan sosial, pengorganisasian masyarakat didefinisikan oleh Rothman dalam (Rothman, J.E., Erlich, J.L., & Tropman, 1995) yakni *earlier definition of community organization as a strategy of “purposive community change”*. Artinya, definisi awal dari pengorganisasian komunitas adalah sebagai sebuah strategi mengenai “perubahan komunitas yang bertujuan”. Perubahan komunitas ini dilakukan melalui penghimpunan sumber daya dari berbagai sektor masyarakat untuk melakukan perubahan bersama-sama secara bertujuan.

Pembentukan koperasi menjadi salah satu bentuk dari pengorganisasian masyarakat, yakni dilakukan melalui pendekatan *community development* atau meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat lokal. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, pengertian koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasar atas azas kekeluargaan.

Penekanan pengorganisasian masyarakat adalah mengembangkan kepemimpinan lokal dan struktur pengorganisasian untuk memungkinkan pedesaan dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi melalui penciptaan sistem sumber bagi masyarakat (Lapin dalam Rothman, Tropman, & Erlich, 1995). Lebih lanjut, koperasi sendiri masuk ke dalam kategori sistem sumber formal, yakni sistem sumber daya di mana menekankan keanggotaan atau asosiasi formal yang memajukan kepentingan anggotanya (Pincus, A., & Minahan, 1973).

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten dari hasil pemekaran Kabupaten Bandung pada tahun 2007. Berdasarkan data pada Maret 2024, Kabupaten Bandung Barat memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, yakni berada di angka 10,52% atau sejumlah 179.430 jiwa (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024). Angka ini lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, yakni sebesar 9,06% (BPS, 2024). Untuk itu, Kabupaten Bandung Barat memiliki berbagai program dan kegiatan dalam menangani kemiskinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pinjaman modal bergulir untuk UMKM, dan sebagainya.

Kabupaten Bandung Barat juga melakukan peningkatan potensi untuk menunjang perekonomian masyarakat yang dilaksanakan melalui koperasi. Koperasi di Kabupaten Bandung Barat saat ini jumlahnya cukup banyak tetapi sifatnya fluktuatif ditandai dengan jumlah koperasi pada tahun 2019, terdapat koperasi sebanyak 527 unit, tahun 2020 berjumlah 415 unit, dan tahun 2021 sebanyak 459 unit (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021). Kenaikan dan penurunan jumlah koperasi di Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor masyarakat yang mengelola koperasi, minat masyarakat terhadap koperasi hingga besaran modal koperasi yang dimiliki.

Desa Mekarmukti merupakan salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 1.701 KK (Profil Desa Mekarmukti, 2023). Desa ini juga menjadi wilayah pengembangan di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bandung Barat karena memiliki berbagai potensi dimana sebagian besar warganya merupakan pelaku usaha mikro jenis ikan pindang, wajik, dan gurilem. Kemudian, untuk mendukung adanya peningkatan ekonomi di Desa Mekarmukti sekaligus memberdayakan anggota masyarakatnya, terutama keluarga miskin diberikan kemudahan akses permodalan melalui pembentukan koperasi sinpam pinjam.

Koperasi Awilarangan Mukti Rahayu atau dikenal dengan Koperasi Kamura telah didirikan di lingkungan RW 08 sejak tahun 2018 atas inisiatif tokoh masyarakat. Koperasi ini memiliki program inti, yakni program pembiayaan mikro bagi usaha yang dimiliki oleh keluarga miskin di Desa Mekarmukti melalui sistem sinpam pinjam dan jual beli kebutuhan bagi usaha-usaha di sekitar. Seiring

berjalannya waktu, Koperasi Kamura saat ini telah memiliki anggota sebanyak 35 anggota tetap (Hasil Praktikum Manajemen Perubahan Komunitas, 2023).

Berdasarkan penelitian dari Permana & Adhiem (2019) menjelaskan bahwa lembaga keuangan selain bank, seperti *Baitul Mal Wattanwill* (BMT) dan Koperasi memiliki berbagai permasalahan, seperti permasalahan permodalan, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian, dan pemahaman serta kesadaran masyarakat yang rendah. Selain itu, penelitian Catur (2018) juga menemukan bahwa pengetahuan perkoperasian, kemampuan pengurus, kualitas pelayanan koperasi dan minat mengikuti koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi anggota KUD.

Selaras dengan penelitian-penelitian tersebut, Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi pada saat Praktikum Manajemen Perubahan Komunitas, ditemukan bahwa desain koperasi saat ini memiliki beberapa hambatan dan tantangan, antara lain:

1. Upaya peningkatan ekonomi keluarga miskin melalui koperasi tidak banyak diminati karena adanya bank keliling atau bank emok yang lebih mudah diakses serta sistem peminjaman yang lebih familiar bagi keluarga miskin dengan didukung pencairan dana lebih cepat.
2. Proses pengorganisasian yang kurang partisipatif sehingga presentase keikutsertaan anggota menurun dari tahun ke tahun sehingga membutuhkan integrasi vertikal dan horizontal dari anggota masyarakat.

3. Pengembalian pinjaman yang rendah dan tidak adanya kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan nilai aset bagi anggota di masa depan, sehingga apabila tidak ada transaksi di Koperasi tidak akan mendapatkan keuntungan pada sisa hasil usaha.

Hasil akhir praktikum merekomendasikan rekayasa Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi menjadi Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending*. Peneliti tertarik untuk meneliti penerapan desain ini karena mengingat bahwa pengorganisasian masyarakat melalui program pembiayaan mikro yang dijalankan koperasi simpan pinjam telah banyak berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi anggotanya (Riyanto, 2019). Selain itu, kegiatan yang mendorong sektor perekonomian harus dilakukan oleh semua pihak dengan pelibatan masyarakat secara maksimal dan bertujuan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan (Sutrisna, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan dan menyempurnakan desain pada saat praktikum Manajemen Perubahan Komunitas, melalui pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* dengan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan berjudul “Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi Dan *Integrated Peer to Peer Lending* Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini bertujuan guna mengembangkan dan menyempurnakan desain agar menjawab tantangan dan kebutuhan koperasi sebagai sistem sumber yang ideal terhadap peningkatan ekonomi keluarga miskin.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat” dengan sub problematik, berikut:

1. Bagaimana Desain Awal Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana Kebutuhan untuk Penyempurnaan Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana Perencanaan pada Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana Implementasi Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?
5. Bagaimana Desain Akhir Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk mengimplementasikan dan menyempurnakan “Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”. Adapun, tujuan khusus pada penelitian ini, meliputi:

1. Mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan Desain Awal Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan kebutuhan akan penyempurnaan Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
3. Mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan perencanaan Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
4. Mengimplementasikan, mengkaji, dan menganalisis Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

5. Mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan Desain Akhir Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya modifikasi pada teori ilmu pekerjaan sosial praktek Manajemen Perubahan Komunitas (MPK). Secara khusus, adanya desain baru dalam pengorganisasian keluarga miskin, yakni melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer To Peer (P2P) Lending* yang tersistematis. Desain ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pada desain sebelumnya, yakni desain koperasi yang kurang partisipatif, tidak aksesibel, tidak familiar, dan tidak berorientasi pada pertumbuhan nilai aset anggota.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pekerja Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Pendamping Koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa terutama keluarga miskin, yakni untuk dapat mempraktikkan Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan  
Pendahuluan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Kajian : Memuat tinjauan tentang penelitian terdahulu dan  
Pustaka kepustakaan yang relevan, antara lain: tinjauan mengenai kemiskinan, tinjauan tentang keterkaitan praktik pekerjaan sosial dengan bidang kemiskinan, tinjauan tentang pemberdayaan masyarakat, tinjauan pengorganisasian masyarakat, tinjauan tentang *peer to peer lending*, tinjauan mengenai integrasi, tinjauan tentang keluarga miskin, tinjauan tentang koperasi.
- BAB III Metode : memuat tentang rancangan penelitian, penjelasan istilah,  
Penelitian sumber data dan cara menentukannya, pemeriksaan keabsahan data, teknik pengumpulan data, analisis data serta jadwal dan langkah penelitian.
- BAB IV Hasil : memuat tentang gambaran umum wilayah penelitian,  
Penelitian dan hasil penelitian meliputi desain awal, kebutuhan  
Pembahasan penyempurnaan desain, perencanaan desain, implementasi desain, dan desain akhir, serta memuat pembahasan hasil penelitian.
- BAB V : memuat tentang implikasi teoritis dan implikasi praktis.  
Implikasi Implikasi teoritis berarti akibat langsung atau  
Penelitian konsekuensi atau temuan teoritis hasil penelitian. Implikasi praktis berarti akibat langsung atau konsekuensi atau temuan praktis dari hasil penelitian.
- BAB VI : memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan  
Kesimpulan dan meliputi jawaban subproblematik dari penelitian,  
Saran implikasi teoritis dan praktis. Saran meliputi rekomendasi ke berbagai pihak.